

PERAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI INDONESIA

Sukidjo

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

sukidjo@uny.ac.id

Abstract: The Role of Entrepreneurship Education in the Empowerment of the Poor in Indonesia. Poverty has become an international problem. Poverty reduction effort is a major commitment of all countries that have ratified the Millennium Development Goals. The nature of poverty involves many aspects such as economic, political, and social and cultural. Therefore, poverty reduction programs consisting of financial/economic support as well as empowerment program i.e. entrepreneurship education. This empowerment program focuses on shaping an independent mental attitude, creative, and persistent so that the individuals' potential and provided facilities can be utilized optimally. Furthermore, "the charity programs" should be addressed specific to the poor who are elderly.

Keywords: poverty, empowerment and entrepreneurship

Abstrak: Peran Pendidikan Kewirausahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia. Kemiskinan telah menjadi masalah internasional, dan upaya pengurangan kemiskinan merupakan komitmen utama semua negara yang telah meratifikasi *Millenium Development Goals*. Hakikat kemiskinan bersifat multi aspek, baik ekonomi, politik maupun social budaya. Oleh sebab itu program pengurangan kemiskinan tidak dapat hanya diberikan bantuan ekonomi melainkan perlu dilakukan pemberdayaan berupa pendidikan kewirausahaan, untuk membentuk sikap mental yang mandiri, pantang menyerah, kreatif serta mengembangkan *need for achievement*, sehingga potensi yang dimiliki maupun fasilitas yang diperoleh dapat dikembangkan. Sebaliknya program-program yang bersifat belas kasihan sebaiknya hanya diberikan kepada warga miskin yang berusia lanjut. Bantuan yang bersifat belas kasihan yang selama ini diberikan ternyata kurang mendidik karena menyebabkan malas bekerja, dan pemanfaatannya kurang produktif.

Keywords : kemiskinan, pemberdayaan dan kewirausahaan

Pendahuluan

Salah satu masalah yang harus dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang adalah banyaknya penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, pengurangan kemiskinan merupakan prioritas pada pelaksanaan pembangunan ekonomi. Bagi Indonesia, pengurangan kemiskinan merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Mengingat masih banyaknya penduduk dunia yang

berada dalam kemiskinan, maka wajar jika kemiskinan menjadi masalah internasional. Hal ini terbukti, PBB telah menetapkan *Millenium Development Goals* (MDGs) di mana salah tujuan yang hendak dicapai adalah mengurangi tingkat kemiskinan.

Sebagai peserta Konferensi Tingkat Tinggi Milenium PBB, Indonesia secara sungguh-sungguh untuk mengurangi jumlah penduduk miskin hingga mencapai 50% pada tahun 2015. Sebenarnya, kesungguhan

Indonesia mengurangi kemiskinan telah dilakukan sejak decade 1970-an, jauh sebelum adanya MDGs, yakni melalui program Inpres Desa Tertinggal hingga kini dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kesungguhan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dituangkan dalam sasaran umum Program Pembangunan Nasional (Propenas) di bidang ekonomi yang berupa (a) mempercepat pemulihan ekonomi, (b) meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, (c) mengendalikan laju inflasi, (d) menurunkan pengangguran, dan (e) mengurangi jumlah penduduk miskin (Propenas, 2004: 12).

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini dinilai kurang menekankan pemberdayaan, bermotif belas kasihan sehingga dampaknya justru membuat masyarakat menjadi manja, malas dan selalu mengharapkan bantuan belas kasihan dari pihak lain. Keadaan demikian tidak dapat dibiarkan sehingga perlu dilakukan upaya mengubah "mindset" penduduk miskin agar memiliki kemampuan dan keberanian mencoba usaha yang bersifat produktif guna memperoleh pendapatan dari hasil usaha sendiri serta mampu keluar dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Perlu disadari bahwa masalah kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, melainkan merupakan masalah yang kompleks, sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, politik maupun sosial budaya. Salah satu alternative pemecahan adalah melalui kegiatan pemberdayaan, dan pendidikan

kewirausahaan, guna mengubah sikap mental ketergantungan serta menumbuhkembangkan etos kerja, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian. Dengan cara demikian, diharapkan memunculkan kesadaran bahwa untuk menghilangkan kemiskinan harus ditempuh melalui usaha produktif yang dilakukan oleh mereka sendiri.

Karakteristik Kemiskinan

Menurut Mudrajat Kuncoro (2006: 112) kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Definisi ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Affandi Subari dkk., yang menyatakan kemiskinan sebagai suatu keadaan dengan tingkat pendapatan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup layak (Subari, 2000: 31). Dalam pengertian ini, kemiskinan hanya dimaknai sebagai permasalahan pendapatan individu, kelompok, komunitas yang berada di bawah garis kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin apabila pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Jika ditelaah secara mendalam, kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi, melainkan bersifat multidimensional, sehingga kemiskinan harus dilihat dari berbagai aspek. Dari aspek ekonomi, kemiskinan akan tampak pada rendahnya pendapatan, terbatasnya pemilikan alat produksi, daya tawar rendah, tabungan rendah, serta lemahnya mengantisipasi peluang. Dilihat dari aspek sosial, orang miskin mengalami keterbatasan interaksi sosial dan

penguasaan informasi. Dilihat dari aspek psikologi, kemiskinan akibat dari rasa rendah diri, fatalisme, malas, rasa terisolir. Dari aspek politik, terlihat dari kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, posisi lemah dalam proses pengambilan keputusan, adanya kecenderungan diskriminatif (Rujito, 2003: 75-81).

Selanjutnya Rujito (2003: 124), membedakan kemiskinan menjadi tiga kelompok, yakni kemiskinan absolut, relatif dan kultural. Sedangkan dilihat dari faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni kemiskinan alamiah (natural), kemiskinan buatan atau struktural (structural poverty) dan kemiskinan kultural (Namba: 2003:10; Muttaqin: 2006: 4). Kemiskinan natural merupakan kemiskinan yang terjadi akibat kondisi lingkungan yang miskin, sumber daya alam yang terbatas, serta bencana alam. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang terjadi akibat dari adanya kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber alam yang membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan fasilitas, sehingga mereka berada dalam kondisi miskin. Sedangkan kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya atau mental misalnya perilaku malas bekerja, mudah menyerah, putus asa, dan senang judi .

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan yang diterima lebih rendah dari garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan minimumnya. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan keadaan kemiskinan dengan cara membandingkan pendapatan antar kelompok dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam kemiskinan relative, seseorang mungkin tidak miskin karena pendapatannya berada di atas garis kemiskinan, namun mereka dikelompokkan dalam kategori miskin karena mereka berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya.

Ada berbagai ukuran yang digunakan dalam menetapkan garis kemiskinan, misalnya ; (1) Bank Dunia menetapkan pendapatan US \$ 2 per hari per kapita sebagai batas kemiskinan menengah dan US \$ 1 untuk kemiskinan absolut; (2) Sayogya menetapkan pendapatan setara beras 320 kg untuk pedesaan dan 480 kg untuk perkotaan, sedangkan Biro Pusat Statistik (2008) menggunakan 14 kriteria untuk menetapkan rumah tangga miskin. Keempat belas kriteria tersebut meliputi: (a) Luas rumah kurang dari 8 meter persegi per orang; (b) Lantai rumah dari tanah; (c) Dinding rumah bambu; (d) Tidak mempunyai WC; (e) Penerangan tidak menggunakan listrik; (f) Air minum dari sumur atau sungai; (g) Memasak menggunakan kayu bakar; (h) Makan daging sekali dalam seminggu; (i) Membeli pakaian baru sekali dalam setahun; (j) Makan satu atau dua kali sehari; (k) Tidak mampu membayar berobat di Puskesmas /dokter; (l) Pendapatan kurang dari Rp600.000,00 / bulan; (m) Pendidikan hanya SD, dan (n) Tidak mempunyai barang yang dijual di atas Rp500.000,00. Menurut BPS, rumah tangga

miskin dikatakan miskin apabila minimal memenuhi sembilan dari empat belas kriteria tersebut.

Menurut Loekman Soetrisno (1999:18-19) dalam memahami substansi kemiskinan di Indonesia terdapat dua jenis '*school of thought*' yakni kelompok pertama adalah kelompok *agrarian populism* dan kelompok kedua yang biasanya terdiri dari para pejabat. Menurut kelompok *agrarian populism*, kemiskinan timbul sebagai akibat dari campur tangan yang terlalu luas dari negara. Oleh sebab itu, kelompok *agrarian populism* berpendapat bahwa untuk memberantas kemiskinan dilakukan dengan '*empowerment*'. Sedangkan kelompok kedua yang terdiri dari para pejabat berpendapat bahwa inti dari masalah kemiskinan adalah masalah budaya, orang miskin karena tidak memiliki etos kerja tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikan rendah. Pendapat kelompok kedua ini sejalan dengan pendapat Heru Nugroho (1999: 29) bahwa kemiskinan yang dialami oleh sekelompok orang sebagai akibat nilai-nilai sosial-budaya yang menjadi orientasi tindakannya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kemiskinan diperlukan perubahan nilai-nilai sosial budaya. Sementara itu, Moeljarto Tjokrowinoto (1993: 254) berpendapat bahwa untuk mengatasi kemiskinan ditempuh strategi: (a) pemberdayaan merupakan prasyarat mutlak untuk menumbuhkan kesadaran kritis untuk mengubah sifat tidak berdaya maupun menyerah diri pada nasib; (b) pemutusan hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap orang miskin; (c) menanamkan rasa kesamaan (*egalitarian*) dan memberikan pengertian

bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir, dan nasib dapat diubah; (d) perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh; (e) pembangunan sosial dan budaya masyarakat miskin menuju perubahan nilai-nilai positif misalnya optimisme, perubahan kebiasaan hidup dan peningkatan produktivitas; dan (f) redistribusi infrastruktur yang lebih merata.

Pendidikan Kewirausahaan

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengubah tingkah laku seseorang. Kegiatan pendidikan dirancang, diatur, dimonitor dan dievaluasi agar mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manusia memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan. Dengan pendidikan, kekuatan intelektual, daya moral maupun daya sosial dapat dikembangkan. Dengan pendidikan, pengetahuan, sikap dan keterampilan dapat ditingkatkan. Apapun rumusannya, pada dasarnya pendidikan mempunyai tujuan untuk perbaikan manusia, untuk mengetahui apa yang baik bagi manusia (Hutchin, 1998: 113). Bahkan, Paulo Friere menyatakan pendidikan harus jauh dari penindasan, melainkan pendidikan harus mampu membebaskan diri, pendidikan yang memanusiakan (1998: 434-445). Oleh sebab itu pelaksanaan pendidikan harus mengutamakan dialog dan bukan dehumanisasi.

Kewirausahaan merupakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan dan menerapkan cara kerja, teknologi dan

produk baru secara efisiensi guna memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kegiatan kewirausahaan merupakan semangat dan sikap seseorang dalam menangani kegiatan usaha dengan berlandaskan ciri dan watak wirausahawan yang handal. Menurut Suryana (2001: 15-19) ciri kewirausahaan yang merupakan nilai hakiki yang penting meliputi (a) percaya diri; (b) berorientasi tugas dan hasil; (c) keberanian mengambil risiko; (d) kepemimpinan; (e) berorientasi ke masa depan; dan (f) keorisinilan: kreativitas dan keinovasian. Perlu disadari bahwa pada diri setiap orang sebenarnya terdapat potensi kewirausahaan yang tingkatannya tidak sama. Menurut McLelland, dalam diri manusia terdapat tiga kebutuhan dasar, yakni *need for achievement*, *need for affiliation* dan *need for power* (Wiratmo, 1998: 7). *Need for achievement* (N-Ach) merupakan dorongan untuk mencapai hasil yang terbaik. N Ach ini melahirkan sifat kerja keras, ulet, pantang menyerah, berani mengambil risiko, mencari dan memanfaatkan peluang guna memperoleh prestasi yang terbaik. Seseorang yang memiliki N Ach tinggi cenderung menjadi wirausaha yang sukses. *Need for affiliation* merupakan kebutuhan untuk membentuk hubungan maupun komunikasi yang harmonis, menjaga kedamaian, ketenangan, persahabatan yang baik dan menjaga agar tidak terjadi konflik. *Need for power* adalah kebutuhan untuk berkuasa, merupakan dorongan untuk mempengaruhi, mengatur dan meyakinkan orang lain, sehingga bersedia mengikutinya. Sehubungan dengan itu, maka yang dimaksud pendidikan

kewirausahaan dalam tulisan ini adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk menumbuhkembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sehingga mereka memiliki nilai dan ciri kewirausahaan dalam rangka meningkatkan usahanya untuk mengatasi kemiskinan.

Pemberdayaan Masyarakat

Secara ringkas, kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakberdayaan seseorang yang berkaitan dengan aspek politik, sosial, lingkungan, ekonomi dan aset produktif. Oleh sebab itu, upaya pengentasan kemiskinan sebaiknya dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan. Menurut Mardi Yatmo Nugroho (2000: 2), dalam pemberdayaan terdapat tiga paradigma yakni *magical paradigm*, *native paradigm* and *critical paradigm*. Menurut *magical paradigm*, bahwa struktur sosial maupun struktur ekonomi sudah *given*, sehingga pemberdayaan dimaksudkan sebagai usaha bagaimana masyarakat miskin menyesuaikan dengan yang sudah *given*, sehingga arah pemberdayaan adalah mengubah sikap mental masyarakat dan memberikan santunan, misalnya pangan, bantuan modal, maupun pembangunan prasarana pendidikan. Menurut *native paradigm* bahwa tatanan social, ekonomi, politik maupun budaya sudah tidak ada masalah, dan masalah yang ada terletak pada kebijakan operasional, sehingga aksi pemberdayaan yang perlu dilakukan adalah mengubah *top down menjadi bottom up*, sambil mengembangkan sumber daya manusia, dan menguatkan kelembagaannya. Sedangkan menurut *critical paradigm* ketidakberdayaan

masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, social dan budaya, yang tidak memberi ruang bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya menata kembali tatanan yang sudah ada, semua tatanan dianggap salah caranya dengan memfasilitasi rakyat miskin untuk berani melawan orang kaya, pengusaha dan pemerintah.

Menurut Hutomo (2000: 3) pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, penguatan untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya. Sementara itu, *United States Department of Agriculture* yang dikutip oleh Fiqih Santoso (2008) menyebutkan bahwa *“community empowerment is a process of interaction networks in order to improve the capacity of community, to support sustainable development, and development of quality of life of the community”*.

Selanjutnya Fiqih Santoso (2008) menyebutkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat bukan untuk mencari dan menetapkan solusi, atau struktur pemecahan masalah, melainkan bekerja bersama masyarakat sehingga masyarakat dapat mendefinisikan dan menangani masalah, dan terbuka untuk mengekspresikan kepentingan mereka sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengertian tersebut sejalan

dengan pendapat Deepa Narayan yang mengatakan bahwa: *“Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives”* (Nerayan, 2002: 14)

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Sehubungan dengan itu, Gunawan Sumodiningrat (1999: 133-134) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jalur, yakni: (1) menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); (2) menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*); dan (3) memberikan perlindungan (*protecting*).

Program Pendidikan Kewirausahaan dalam Meningkatkan Usaha Warga Miskin

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah masalah budaya. Kemiskinan disebabkan karena tidak memiliki etos kerja tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikan rendah. Di lain pihak upaya mengurangi kemiskinan tidak hanya dilakukan dengan memberikan santunan atau bantuan cuma-cuma, melainkan dilakukan dengan pemberdayaan untuk mengubah sikap mental “pengemis bantuan” menjadi sikap yang ekonomis

produktif. Untuk itu kegiatan pemberdayaan perlu dilengkapi dengan pendidikan kewirausahaan. Adapun bentuk kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengurangi kemiskinan antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan "rasa percaya diri" bahwa mereka memiliki kemampuan dan berani melakukan kegiatan usaha. Hilangkan *mindset* "ana dina ana upo" artinya jika ada hari pasti ada makanan, dan diganti dengan *mindset* "yen ora obah ora mamah," artinya kalau tidak bekerja tidak akan makan. Dari pelatihan ini diharapkan dapat menumbuhkan *need for achievement* sehingga timbul etos kerja tinggi, dan senang untuk kerja keras.
2. Memberikan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha menuju ekonomi produktif. Untuk itu perlu dilatih keterampilan menyusun rencana bisnis, studi kelayakan, dan memahami pasar produk.
3. Mengembangkan inovasi dan kreativitas sehingga mampu membaca peluang, misalnya memanfaatkan limbah, barang bekas maupun sumber daya alam lokal menjadi produk yang bernilai. Limbah sampah organik dapat diubah menjadi pupuk kompos, limbah bungkus plastik, kayu, kain dapat diubah menjadi produk kerajinan, misalnya mainan anak-anak, tas, boneka, mobil-mobilan. Limbah kotoran dapat diubah menjadi biogas. Pengembangan inovasi dan kreativitas ini sangat penting sebab akan dapat mendorong seseorang untuk berani mencoba, memanfaatkan peluang.
4. Mendidik untuk mengubah sifat boros menuju efisien, sifat konsumtif menjadi produktif. Kegiatan usaha akan berkembang apabila didukung oleh modal yang kuat. Untuk itu para warga miskin perlu diarahkan agar senang menabung dan jangan mencari pinjaman ke rentenir. Upayakan penggunaan modal untuk usaha dan bukan untuk konsumtif.
5. Berikan pendampingan usaha. Banyak warga miskin mengalami kesulitan dalam memulai usaha, sehingga perlu adanya pendampingan untuk mengatasi berbagai permasalahan misalnya dalam mendapatkan bahan baku, cara produksi maupun dalam pemasaran produk. Pemasaran produk merupakan kunci sukses usaha, sebab banyak produsen yang mampu menghasilkan produk tetapi tidak mampu memasarkannya. Perlu kiranya para warga miskin ini membentuk koperasi guna mengatasi permasalahan ekonomi mereka.
6. Mengembangkan jiwa kemandirian serta berani menghadapi risiko atas keputusannya. Seseorang yang tidak memiliki jiwa kemandirian, segala perilakunya akan bergantung pada pihak lain. Kebergantungan menyebabkan mereka tidak dewasa, manja serta tidak mau berusaha keras, sehingga inovasi dan kreativitasnya tidak berkembang. Sebaliknya seseorang yang memiliki jiwa kemandirian akan muncul pada diri

mereka sikap percaya akan kemampuan diri, berani memanfaatkan peluang, tidak takut gagal dan selalu bekerja keras, ulet serta kreatif.

Kesimpulan

Pendidikan kewirausahaan sangat diperlukan untuk menumbuhkan kreativitas, inovasi serta motivasi berprestasi. Mengingat masalah kemiskinan disebabkan oleh faktor ekonomi maupun budaya, maka untuk mengatasi kemiskinan perlu dilakukan program pemberdayaan dan dilengkapi pendidikan kewirausahaan guna membentuk sikap mental yang mandiri, pantang menyerah, kreatif, ulet dan senang mengejar prestasi terbaik, sehingga potensi yang dimiliki maupun fasilitas yang diperoleh dapat dikembangkan. Sebaliknya program-program yang bersifat belas kasihan sebaiknya hanya diberikan kepada warga miskin yang berusia lanjut. Program kewirausahaan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.

Program pemberdayaan yang dilakukan berupa kegiatan penciptaan iklim usaha, penguatan potensi, perlindungan serta pendampingan. Program pemberdayaan hendaknya dilengkapi dengan pendidikan kewirausahaan guna menumbuhkan sikap mental dan watak kewirausahaan pada warga miskin sehingga mereka memiliki sikap percaya diri, mandiri, bekerja keras, kreatif, mampu melihat dan memanfaatkan peluang, berani mengambil risiko, dan berorientasi ke masa depan.

Daftar Pustaka

- Biro Pusat Statistik (2007). *Statistik Indonesia 2007*.
- Fiqih Santoso (2008). *Concept and Method for Community Empowerment Indonesia*, <http://appreciativeorganization.wordpress.com/2007/08/08>, didownload 8 April 2010
- Friedmann (1992) *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Cambridge Mass: Blackwell Publisher.
- Gunawan Sumodiningrat (1999) *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Heru Nugroho (1999) *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia: Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Hutchins, Robert Maynard (1998) *Pendidikan Liberal Sejati dalam Menggugat Pendidikan: Fundamental, Konservatif, Liberal, Anarkhis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kuncoro, Mudrajat (2006) *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Loekman Soetrisno (1999) *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia: Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Mardi Yatmo Hutomo (2000) *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoretik dan Implementasi. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang*

- diselenggarakan oleh Bappenas tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta.
- Moeljarto Tjokrowinoto (1993) Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan. *Makalah untuk Seminar Bulanan P3PK*, UGM
- Muttaqin, Hidayatullah (2006) "Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Ekonomi Indonesia, September 1st, 2006* in arsid E-Syariah <http://jurnal-ekonomi.org>
- Namba (2003) Pendekatan Ekosistem dalam Penanggulangan Kemiskinan: Refleksi Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Rakyat. Edisi Maret 2003*. www.ekonomirakyat.com.
- Narayan, Deepa (2002) *Empowerment and Poverty Reduction: A Source book*. Washington.DC: The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.
- Rujito (2003) *Pengenasan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat No.1 Maret 2003*. Yogyakarta: Bank Rakyat Indonesia
- Santosa, Awan, Dadit Hidayat dan Puthut Indroyono (2003) Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran, *Jurnal Ekonomi Rakyat, TH II No. 2 April 2003* Yogyakarta: UGM.
- Soetrisno, R. (2001) *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Subari, Affandi, dkk. (2005) *Penanggulangan Kemiskinan: Diklat Penanggulangan Kemiskinan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
- Suharto, Edi (2007) *Konsep dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerjaan Sosial*. <http://www.policy.hu> didownload. 24 September 2008)
- Sukamto, Hadi, dkk. (2006) *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Kelurahan Bandulan, Keamatan Sukun Kota Malang)*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Suryana (2001) *Kewirausahaan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Wiratmo, Masykur (1998) *Pengantar Kewiraswastaan: Kerangka Dasar Memasuki Dunia Bisnis*. Yogyakarta: BPFE UGM